

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum bagi anak dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dan bentuk jaminan perlindungan hukum bagi anak dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), serta spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan Perundang-undangan (hukum positif), Sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum *in concret*. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode Pengolahan Bahan Hukum dengan reduksi data, *display* data, klasifikasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi anak dalam dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan indonesia secara umum telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah sesuai dengan teori jenjang hukum yang artinya peraturan yang berkedudukan di atas menjadi pedoman bagi peraturan yang ada di bawah dan peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan di atas. Bentuk jaminan meliputi Jaminan pengaturan mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan; Jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan kesehatan; Jaminan pengaturan mendapatkan ASI *Eksklusif*; Jaminan pengaturan mendapatkan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak; Jaminan pengaturan mendapatkan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan; Jaminan pengaturan memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritual anak; Jaminan pengaturan atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelayanan Kesehatan

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN ACCESSING HEALTH SERVICES IN INDONESIA'S STRUCTURE OF LAW

ABSTRACT

This study aims to determine the synchronization of legal protection arrangements for children in accessing health services in the structure of Indonesian legislation and the form of guarantees for legal protection for children in accessing health services in the structure of Indonesian legislation. This study uses a normative juridical method with a statutory approach (Statute Approach), an analytical approach (Analytical Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach), as well as research specifications on an inventory of laws and regulations (positive law), legal synchronization, and legal discovery. in concrete. The data used is secondary data through literature study. Legal Material Processing Method with data reduction, data display, data classification. This research is presented in the form of narrative text. The method of analyzing legal materials is normative qualitative. Based on the results of the study, that the regulation of legal protection for children in accessing health services in the structure of Indonesian legislation in general has shown a level of synchronization. This is evidenced in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 concerning Implementation of Immunization, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning Child Health Efforts; Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights; The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is in accordance with the legal level theory, which means that the regulations located above serve as guidelines for the regulations below and the regulations below do not conflict with the regulations located above. Forms of guarantees include guarantees for setting up basic and advanced immunizations; Regulatory guarantees for obtaining health services; Regulatory guarantees for obtaining exclusive breastfeeding; Regulatory guarantees for obtaining complete immunizations for every infant and child; Guaranteed arrangements to obtain comprehensive health facilities and efforts for children so that each child obtains optimal health degrees from the time he is in the womb; Regulatory guarantees for obtaining proper health and social security services, in accordance with the child's physical and mental spiritual needs; Regulatory guarantees for maintenance and protection, both during pregnancy and after birt.

Keywords: *Legal Protection, Children, Health Services*